

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ketertarikan penulis untuk memahami lebih lanjut mengenai studi kawasan Asia Tenggara merupakan langkah awal dari penulisan skripsi ini. Dari ketertarikan ini kemudian penulis akan lebih memfokuskan pembahasan mengenai Malaysia dan dinamika masyarakatnya.

Malaysia adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bagi penduduk Muslim Malaysia, Islam mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan bangsa Melayu, seperti dalam ungkapan "Melayu adalah Islam dan Islam adalah Melayu". Berhubung Muslim merupakan mayoritas di negeri ini maka Malaysia memang tidak lepas dari tantangan politik dari kelompok-kelompok pemilih Islam yang memperjuangkan negara Islam atau paling tidak islamisasi negara dan masyarakat yang lebih besar.

Sejak menjadi Perdana Menteri di tahun 1981 Mahathir Mohammad terpaksa menyepakati tuntutan politis mengenai formalisasi syariat Islam yang semakin meningkat. Meski proporsi jumlah umat Islam Malaysia hanya setengah dari keseluruhan populasi Mahathir Mohammad tak ragu-ragu menegaskan komitmennya pada program islamisasi untuk menciptakan masyarakat Malaysia beretika tinggi. Citra tentang kedekatan Malaysia dengan Islam memang mudah mengental. Hal ini diperkuat dengan semangat

masyarakat Muslim Malaysia yang gemar berupaya menerapkan prinsip-prinsip keislaman dalam berbagai sektor kehidupan bernegara mereka.

Fenomena-fenomena tersebut sangat menarik untuk diamati dan dideskripsikan ke dalam skripsi ini. Dengan memperhatikan penjelasan di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat Malaysia sebagai negara yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian dengan mengambil fenomena *“Kebijakan “Islamisasi” di Malaysia Periode Pemerintahan Mahathir Mohammad “*

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah :

1. Mencari, mengetahui, sekaligus mendeskripsikan perkembangan Islamisasi di Malaysia.
2. Mengamati, menganalisa sekaligus mendeskripsikan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi munculnya islamisasi di Malaysia
3. Sebagai sarana implementasi dan konsep-konsep Hubungan International pada kasus-kasus aktual, sehingga memberikan kontribusi yang positif pada perkembangan Ilmu Hubungan International.
4. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Peran Islam di negara-negara muslim dalam tiga dasawarsa terakhir abad ke-20 mengalami perubahan yang sangat penting. Sejak 1970-an banyak kelompok dan gerakan Islam telah memainkan peranan penting yang cukup politis, reaktif dan terkadang militan di dalam negara bangsa. Pembaharuan Islam atau gerakan kebangkitan kembali ini mencerminkan aspirasi ganda di banyak kaum Muslim di seluruh dunia. Pertama, mereka mencari kebebasan berekspresi dan berpartisipasi yang lebih besar dalam proses negara masing-masing. Kedua, mereka menghendaki masyarakat mereka secara eksplisit dapat dikenali sebagai masyarakat Muslim, baik secara kultural maupun politis. Masalah mengenai peran Islam dalam mempengaruhi dinamika negara bangsa merupakan bagian penting dalam perdebatan dan persaingan politik sehari-hari di kalangan muslim di Asia Tenggara, termasuk di Malaysia.

Malaysia berada di wilayah regional atau kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara federasi yang terdiri dari tigabelas negara bagian yang terbagi ke dalam dua wilayah yang terbentang diantara Laut Cina Selatan. Pertama, Malaysia barat dimana wilayah ini terdapat banyak industri serta pusat modal yang terpusat di Kuala Lumpur. Kedua, Malaysia timur yang terdiri dari wilayah federasi yaitu Sabah dan Serawak yang terletak di kepulauan Kalimantan.¹

Pada tanggal 13 Agustus 1957 Malaysia mendapat kemerdekaannya dari tangan kolonial Inggris. Meskipun terjadi pendudukan oleh portugis,

¹ Clark D. Nether dan Ross Marlay, *Democracy and Development in Southeast Asia : The Winds of Change*, Westview Press, BO Colorado, 1995 hal. 96.

Belanda dan Inggris, ternyata tidak banyak membawa perubahan dalam sikap hidup bangsa Melayu yang beragama Islam. Islam mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan bangsa Melayu. Pengaruh yang dibawa Islam tercemrin pada corak kebudayaan dan peradaban bangsa Melayu-Malaysia.

Disamping gotong royong masyarakat Melayu juga menjunjung tinggi konsep ummah (komunitas persaudaraan Islam) yaitu suatu konsep komunitas yang percaya kepada Allah sebagai tuhanNya dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya.² Dalam komunitas tersebut setiap anggota bertanggung jawab dan dituntut saling membantu kepada anggota komunitas ummahnya dimanapun dan kapanpun. Dalam hal ini Islam bahkan sudah menjadi ideologi masyarakat Melayu karena agama tersebut juga mengatur semua aspek kehidupan termasuk ekonomi, sosial dan politik nasionalnya. Hal itu merupakan bukti bahwa masyarakat Melayu telah menggunakan konsep yang terdapat dalam konsep ummah, bahkan konsep ini terus dipelihara dan diperkuat oleh gerakan-gerakan keagamaan seperti badan-badan dakwah.

Kenyataannya, negara ini memiliki berbagai macam etnis disamping etnis Melayu yang merupakan etnis pribumi yang sebahagian besar beragama Islam. Selain etnis Melayu, ada pula etnis Cina dan India yang merupakan etnis pendatang dan sebahagian besar merupakan penganut agama Budhisme, Kristen dan Hinduisme. Di Malaysia selain bahasa, agama merupakan faktor diferensi kultural yang berpotensi mengancam integrasi nasional. Agama secara objektif menjadi faktor pembeda ketiga kelompok etnik diatas. Jika

² Abdullah Taib dan Muhammad Yusuf Ismail, *Struktur Sosial* dikutip dari H. Osman Rani dan E.L. Fisk, *Ekonomi Politik Malaysia*, Kuala Lumpur, Fajar Bakti sdn bhd., 1983. hal 125

bahasa menyediakan sebuah basis mobilisasi bagi ketiga etnik, maka agama menemukan fungsi positifnya hanya dalam masyarakat Melayu.³

Sejak menjadi Perdana Menteri di tahun 1981, Mahathir Mohammad Mahathir bersama partai yang memerintah UMNO (*Uniteds Malays National Organization*) melakukan modernisasi berdasarkan pada dua prinsip⁴. Pertama, pengangkatan nilai-nilai dan identitas Islam. Mahathir membangun proyek-proyek besar yang berkaitan dengan Islam Kedua, pemerintah memberikan banyak kemudahan bagi kaum pribumi(bumiputra) untuk menduduki posisi dalam pemerintahan, mendapatkan fasilitas pendidikan dan ekonomi.

Dibawah kepemimpinan Mahathir Mohammad benar-benar berusaha mengedepankan nilai-nilai keislamannya melalui jalur pemerintahan dengan memperluas keterlibatannya dalam urusan Islam dengan berbagai cara antara lain : memperluas berbagai liputan di media masa mengenai Islam, membenahan kurikulum sekolah, mendirikan Universitas Islam International, mendirikan fakultas-fakultas tentang kajian Islam di berbagai universitas yang ada, mendirikan bank dan asuransi Islam dan memperbesar dana untuk pembangunan masjid.

Penerapan nilai-nilai Islam di Malaysia telah berlangsung dengan dukungan hukum, institusi dan instrumen negara (*state-sponsored-islamization*). Selanjutnya implementasi kebijakan tidak hanya sebatas pada pembangunan fasilitas, wujud nyatanya pemerintah kemudian merintis

³ Chynthia H.Enloe, *Multi Ethnic Politics : The Case of Malaysia*, California, University of California, 1970

⁴ Hardy,Roger. *Malaysia: Islam and Multiculturalism*, BBC News.2005

program Islamisasi undang-undang yang berusaha mengembangkan hukum keluarga Islam (hukum pribadi) bagi Muslim dan meningkatkan pengadilan Syari'ah yang memiliki otoritas atas hukum Islam

Selain itu juga Malaysia ikut terlibat aktif dalam organisasi-organisasi Islam baik dalam ruang lingkup regional maupun internasional. Di bawah pemerintahannya, Mahathir berhasil membentuk citra Malaysia sebagai negara Islam. Citra Islam ini diperkuat dengan kebijakan politik luar negeri Malaysia yang dalam hubungannya dengan Muslim, amat tegas.⁵ Identitas keislaman itu diperkuat Mahathir dengan mengubah pandangan tradisional Malaysia yang pro barat dengan kebijakan yang berpaling ke timur Ia pernah berkampanye *Buy British Last* dan di tahun 1993 selama beberapa bulan menghentikan kerja investor Inggris karena pers Inggris dianggap menghinanya. Sebagai gantinya ia mengembangkan kebijakan *Look East Policy* yang mengundang investor dari timur.

Kebijakan berjangkau nasional dan regional di dorong oleh kritiknya terhadap nilai-nilai barat yang menurutnya terlalu individualistis dan juga penekanan pada nilai-nilai asli Asia(ajaran Konfusius di Jepang dan Taiwan) dan nilai-nilai Islam yang dapat memperkuat komunitas Muslim Melayu dan perkembangan Malaysia pada umumnya. Pantas saja jika kemudian di salah satu reportasenya, majalah *time* memiliki alasan kuat untuk memasukan Malaysia sebagai negara fundamentalis baru dari Asia Tenggara.

⁵ Ummat, *Kisah Sukses dan Paradoks "Soekarno Kecil"*, No.6 Tahun 1, 18 September 1995

Puncaknya ketika pada September 2001 dalam pernyataannya Mahathir menyebut Malaysia sebagai negara Islam.⁶ Pernyataan ini tentu saja berdampak melahirkan perdebatan yang berkelanjutan terutama bagi masyarakat Cina dan India di Malaysia. Meskipun Mahathir kemudian menegaskan, definisi Islamisasi berarti penerapan nilai-nilai etik Islam yang universal kedalam realita Malaysia.

Kekuatan politik utama yang berada di belakang Mahathir yaitu UMNO (United Malay National Organization) memang menjadikan Islam sebagai bagian penting dari perjuangan politiknya. Hal yang menarik justru karena sebenarnya UMNO merupakan partai politik yang memiliki dasar perjuangan berbasis nasionalisme dan sekulerisme. Begitu juga dengan Mahathir Muhammad, beserta tokoh-tokoh UMNO sebelumnya seperti Tunku Abdul Rahman, mereka dikenal sebagai tokoh-tokoh ultra-nasionalis yang banyak terinspirasi oleh gagasan –gagasan dan konsep negara sekuler dari Mustafa Kema Ataturk.

Meskipun demikian, sebegitu jauh pendekatan UMNO dalam menerapkan nilai-nilai Islam mendapat dukungan yang luas dari masyarakat pemilih. Gerakan Islam terbesar di Malaysia, ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) masih mendukung UMNO dan usaha-usaha pemerintah meningkatkan penerapan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Akan tetapi di Malaysia ada kekuatan politik lain yang cenderung memberikan warna berbeda terhadap identitas Islam. Kekuatan politik tersebut adalah PAS

⁶ Prof.Dr.Azyumardi Azra,MA,"*Prospek partai Pluralis menjanjikan*", www.islamlib.com

(Partai Islam Se-Malaysia). Lebih dari UMNO, PAS menjadikan Islam yang mereka pahami sebagai sistem cara hidup yang sempurna, yang mencakup aturan-aturan pidana Islam sebagai konstitusi dan hukum yang berlaku di Malaysia.

PAS merupakan partai oposisi yang terbesar bagi pemerintahan Mahathir, dimana langkah-langkah yang dilakukan oleh PAS merupakan tantangan bagi Mahathir dan UMNO. Kemenangan PAS pada pemilu 1999 di negara Bagian Kelantan dan Terengganu yang semula merupakan basis massa UMNO merupakan bukti bahwa kekuatan PAS tidak bisa diremehkan. Menurut salah seorang aktifis moderat Malaysia, Zainah Anwar, probabilitas Malaysia menjadi negara Islam besar kalau saja partai PAS bisa mengalahkan partai pemerintah, UMNO dalam pemilu.⁷

Sejauh ini, Mahathir telah berhasil mempertahankan kekuasaannya selama hampir 22 tahun lamanya, serta mampu menekan partai Islam yang beraliran fundamentalis yang sekaligus saingan utamanya dimana mereka hanya dominan di negara bagian Kelantan dan Terengganu saja. Hal itu menunjukkan kemampuan Mahathir dalam mengantisipasi isu-isu sensitif dan membuat kebijakan publik yang aman bagi seluruh masyarakat. Ini juga menjadikan kebijakan yang dibuat telah teruji keberhasilannya.

⁷ Muhammad Qadari, *Evolusi dari Bawah*, www.islamlib.com

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan di atas, perumusan masalah yang muncul kemudian adalah :

“Mengapa Mahathir Mohammad terdorong untuk menerapkan kebijakan “islamisasi” di Malaysia ?

E. Kerangka Landasan Teori

Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan “mengapa”, artinya berteori adalah upaya untuk memberikan makna pada fenomena yang terjadi. Teori mengembangkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang berhubungan atau berkorelasi.⁸ Untuk mengeksplanasikan permasalahan di atas penulis menggunakan teori sebagai berikut :

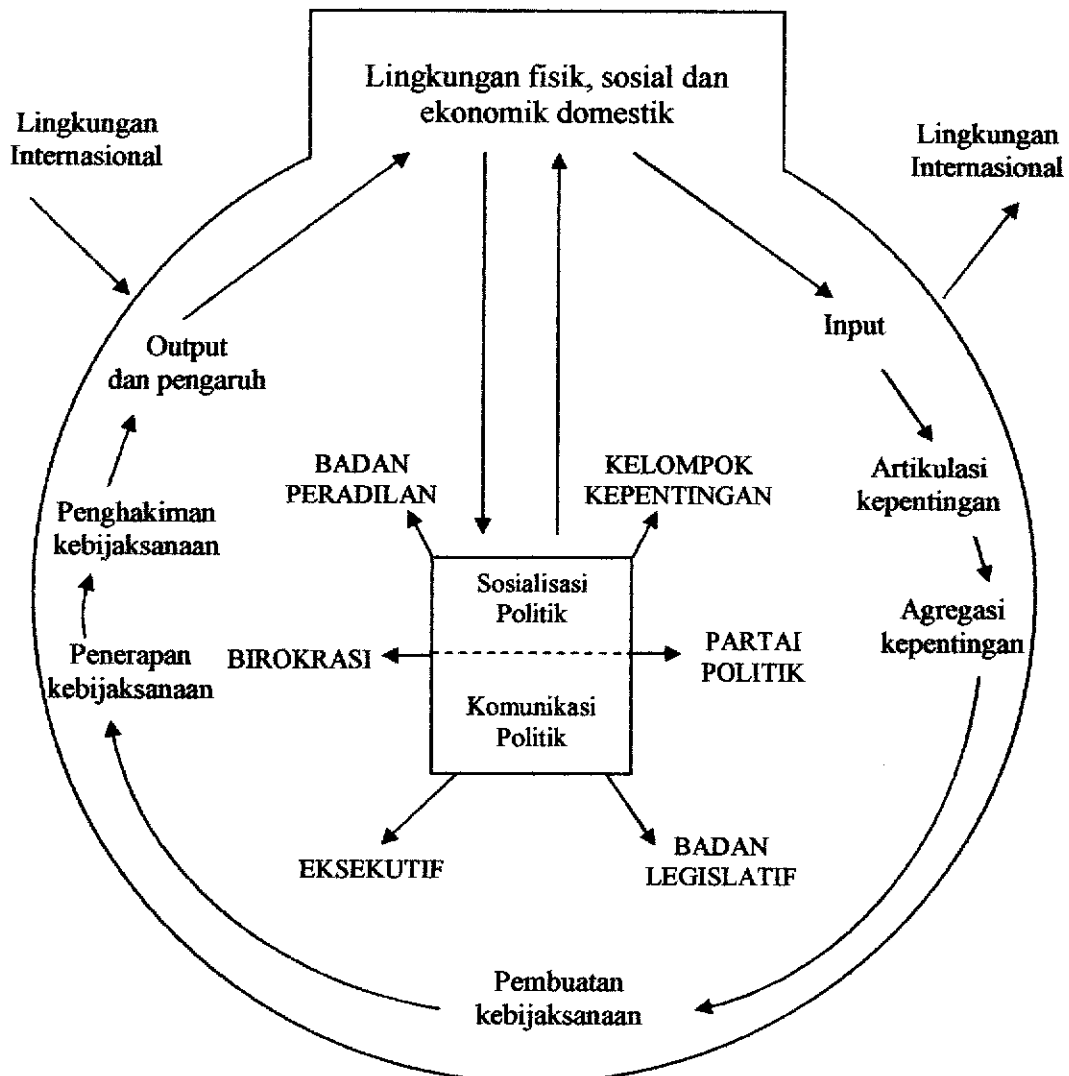
a. Teori Sistem Politik Gabriel A. Almond

Almond mengajukan konsep sistem politik, yang didefinisikannya sebagai sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakatnya sendiri maupun menghadapi masyarakat lain) melalui penerapan atau ancaman penerapan daya paksa yang lebih kurang sah. Dalam suatu sistem politik terdapat struktur-struktur atau elemen-elemen politik seperti kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, eksekutif, birokrasi dan badan-badan peradilan. Kita bisa memberi makna pada ciri-ciri struktur itu setelah mengetahui bekerjanya suatu sistem secara keseluruhan. Bagan

⁸Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (Jakarta : LP3ES, 1983)

diatas menunjukkan bagaimana kita menghubungkan struktur dengan fungsi, proses dengan kebijaksanaan dan bekerjanya suatu sistem.

Bagan I.I



Sumber : Mochtar Mas' oed dan Colin Mac Andrew,(Eds), Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1993),h.29

Ditengah-tengah gambar itu terdapat beberapa fungsi politik yang tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan (*public policy*) tetapi sangat menentukan cara bekerjanya sistem politik. Panah-panah yang berasal dari fungsi-fungsi ini dan

menunjuk pada masyarakat (lingkungan domestik) dan pada kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, badan legislatif, eksekutif birokrasi dan badan-badan peradilan menggambarkan pengaruh dari fungsi ini. Sosialisasi politik yang terdapat dalam setiap sistem politik merupakan fungsi mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk umumnya atau bagian-bagian penduduk dalam menjalankan peranan-perana politik tertentu. Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.

Suatu sistem politik juga tidak berdiri sendiri. Sistem politik dikelilingi oleh lingkungan domestik maupun lingkungan internasional bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kedua lingkungan itu.

Dipinggir-pinggir lingkaran terdapat fungsi-fungsi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam setiap sistem politik. Sebelum kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tujuan-tujuan dapat ditetapkan, individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat dalam masyarakat harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, yaitu apa yang didapatkan dari politik. Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan ini kemudian digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan. Demikianlah, panah dipinggir kanan dari artikulasi kepentingan mengarah ke agregasi atau penggabungan kepentingan. Selanjutnya alternatif-alternatif kebijaksanaan itu dipertimbangkan dan ditentukan pilihan.

Penerapan kebijaksanaan pemerintahan- yang sering disebut 'output'nya sistem politik- mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial dan kebudayaan masyarakat domestik. Pengaruh-pengaruh terhadap masyarakat ini selanjutnya mempengaruhi tuntutan berikutnya yang diajukan pada sistem politik dan bisa meningkatkan maupun meningkatkan kesetiaan politik di kalangan masyarakat itu. Dengan demikian konsep-konsep fungsional ini menggambarkan kegiatan-kegiatan dan proses-proses yang berlangsung dalam setiap masyarakat tanpa memandang struktur-struktur dari sistem politiknya atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuhnya.

b. Partisipasi Politik Gabriel A. Almond

Samuel P. Huntington dan Joan M Nelson dalam *No Easy Choice : Political Participation In Developing Countries* menjelaskan : "Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang di maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif". Kegiatan ini juga mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan atau mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.⁹

⁹ Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, PT Gramedia Jakarta, 1981. h.1

Konsep partisipasi politik merupakan alat analisa yang bisa digunakan untuk mengawali pemahaman mengenai meningkatnya partisipasi Muslim yang lebih besar dalam proses pembuatan keputusan puncaknya mereka mampu mempengaruhi kebijakan politik Mahathir terhadap Islam di Malaysia. Menurut Myron Weiner paling tidak terdapat beberapa hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik ini meliputi¹⁰ :

1. Modernisasi

Komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media komunikasi massa. Ketika penduduk kota baru –yaitu buruh, pedagang dan kaum profesional- merasa bahwa mereka ternyata dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri.

2. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern

Kaum intelektual-sarjana, filosof, pengarang, dan wartawan-sering mengemukakan ide-ide kepada masyarakat untuk membangkitkan tuntutan dalam mempengaruhi setiap pembuatan keputusan politik.

3. Konflik-konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik.

Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang digunakan oleh kelompok saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan ide-ide

¹⁰ Mochtar Mas' oed, Ibid hal.45

dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar hak-hak ini dipenuhi.

1. islamisasi

Di kalangan Muslim dan kelompok Muslim tertentu penegakan hukum Islam dipandang sebagai kewajiban yang dibebankan kepada pemeluknya. Berbagai cara dilakukan oleh kelompok yang ingin menegakan syariah Islam agar negara secara nyata dan konstitusional menyebutkan bahwa dasar negara adalah Islam dan hukum yang berlaku adalah syariah Islam; syariah Islam sebagai satu-satunya sumber hukum dalam segenap aspek kehidupan. Penegakan ini penting karena hal itu akan sangat menentukan arah, tujuan, serta bagaimana negara diatur. Negara yang berasaskan sekularisme tentu saja tidak akan menerima syariah Islam sebagai sumber hukum negara satu-satunya. Negara sekular pasti akan menjadikan kedaulatan di tangan rakyat (demokrasi) sebagai sumber kebenaran.

Gejala-gejala diatas mendorong suatu proses yang biasa terjadi dalam masyarakat Muslim sebagai proses islamisasi. Sebagai definisi umum "islamisasi" adalah proses di mana apa yang dipandang sebagai hukum, nilai-nilai, dan adat kebiasaan Islam didorong agar lebih bermakna dalam negara, masyarakat, dan budaya.¹¹

¹¹ Norani Othman, *Islamisasi dan Demokratisasi di Malaysia dalam konteks regional dan global*, dikutip dari Heryanto, Ariel. K Mandal, Summit. *Menggugat Otoritarianisme di Asia Tenggara: Perbandingan dan Pertautan antara Indonesia dan Malaysia*. Jakarta : KPG, 2005, hal. 245

Selain menggunakan kata “islamisasi” dalam skripsi ini juga digunakan kata “Formalisasi Syariat Islam”. Definisi operasional Formalisasi Syariat Islam bermakna usaha-usaha dan proses untuk menjadikan “Syariat Islam” sebagai hukum formal yang diterapkan sebagai paham dan aturan resmi negara tentang Islam yang meliputi pembuatan aturan perundang-undangan, lembaga formal, maupun aturan hukum dan penetapan sanksi yang memiliki kewenangan untuk mengatur praktik-praktik keagamaan Islam di dalam masyarakat.¹² Syariat Islam sendiri didefinisikan sebagai segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.¹³ Jadi syariat merupakan ajaran Islam yang sama sekali tanpa dicampuri oleh nalar manusia.

F. Hipotesa

Keputusan Mahathir dan UMNO untuk menyesuaikan pemerintahan dan kebijakannya dengan tuntutan formalisasi syariat Islam adalah karena terdorong oleh beberapa faktor-faktor sbb :

1. Faktor Eksternal

a. Pengaruh Keberhasilan Revolusi Iran 1979 dan Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir

¹² Lihat Muhammad Iqbal dan Azhari Akmal Tarigan (ed.), *Syariat Islam di Indonesia (Aktualisasi Ajaran dalam Dimensi Ekonomi, Politik dan Hukum)* pada tulisan Azhari Akmal Tarigan berjudul Penerapan Syariat Islam di Indonesia dalam Perspektif Islam Liberal, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara dan Penerbit Misaka Galiza, Jakarta, 2004, www.rahima.com

¹³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet 1 Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997. h. 7

2. Faktor Internal

- a. Perubahan lingkungan sosial dan politik Malaysia akibat urbanisasi
- b. Tekanan politik dari ABIM dan UMNO
- c. Persaingan politik antara UMNO dan PAS dalam mendapatkan dukungan pemilih Muslim.
- d. Kepentingan Mahathir Mohammad untuk memperoleh dukungan dari pemilih Muslim dalam upaya mempertahankan kekuasaannya dan dominasi politik UMNO di Malaysia.

G. Metodologi Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi bahan-bahan dokumen yang ada di perpustakaan dan internet. Oleh karena itu, data data yang diolah adalah berupa data yang bersumber dari analisa data sekunder seperti buku -- buku, jurnal, majalah dan surat kabar maupun dokumen lainnya.

H. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan memulainya dari sejak Malaysia menerapkan kebijakan Islamisasi yang secara sadar dilakukannya pada tahun 1980-an. Namun juga tidak menutup kemungkinan penulis untuk menggunakan data -- data dan informasi dari tahun -- tahun sebelumnya.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dibagi kedalam beberapa Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan

Didalamnya berisi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemilihan dan hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Sejarah Kebijakan Islamisasi dan Gambaran Umum Malaysia

Berisi pembahasan mengenai Sejarah kebijakan di Malaysia beserta gambaran umum mengenai sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi.

Bab III Perkembangan Politik Malaysia

Memuat pembahasan mengenai dinamika perpolitikan beserta unsur-unsur yang terlibat seperti partai-partai politik dan kelompok kepentingan di Malaysia.

Bab IV Kebijakan Islamisasi Masa Pemerintahan PM Mahathir Mohammad

Berisi analisa mengenai faktor-faktor pendukung munculnya Islamisasi di Malaysia berdasarkan realita kondisi politik dan sosial yang terjadi di Malaysia. Sekaligus memuat tentang penerapan islamisasi di Malaysia baik di bidang pendidikan, sosial, hukum dan ekonomi.

Bab III dan Bab IV ini akan menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab V Penutup

Penulis memberikan kesimpulan akhir dari penelitian skripsi ini yang merupakan penjelasan dari bab-bab sebelumnya.